

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TUNTUTAN FASILITAS
BARANG
(Studi Pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame
Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**SITI NAIMAH
NPM. 1621030054**



Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TUNTUTAN FASILITAS
BARANG
(Studi Pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame
Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**SITI NAIMAH
NPM. 162103005**

Jurusan: Muamalah



**Pembimbing 1 : Drs. Iskandar Syukur, MA.
Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag. M.Kom.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis terhadap sebuah tuntutan keharusan untuk pergantian barang dalam transaksi pemberian fasilitas pada rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung yang dibuat tanpa adanya sebuah akad atau perjanjian sebelumnya. Tuntutan tersebut mengakibatkan adanya keterpaksaan dalam hal pembayaran pergantian barang dikarenakan para penyewa tidak merasa merusak fasilitas berupa kulkas tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik tuntutan fasilitas barang pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik tuntutan fasilitas barang tersebut. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik tuntutan fasilitas barang pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik tuntutan fasilitas barang tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan data primer yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan yaitu praktik pinjam meminjam barang tanpa akad, sedangkan data sekunder yang diperoleh dengan jalan melakukan studi kepustakaan yaitu: mempelajari, memahami, buku-buku, artikel. Dan kitab-kitab fiqh muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tuntutan fasilitas barang pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung dimana dalam transaksi tersebut awalnya dilakukan dengan peminjaman sebuah kulkas dengan dasar keiklasan dan keridhoan guna untuk menunjang fasilitas dan daya tarik penyewa. Namun pemberian pinjaman fasilitas tersebut dilakukan tanpa adanya sebuah akad atau perjanjian yaitu keharusan untuk mengganti apabila terdapat kerusakan. Setelah berjalannya waktu fasilitas yang diberikan tersebut mengalami penurunan kualitas yang disebabkan jarang digunakan sebelumnya, umur dari fasilitas yang cukup lama serta tingginya arus listrik. Hal tersebut mengakibatkan adanya sebuah tuntutan dengan pergantian barang baru. Tinjauan Hukum Islam pada tuntutan fasilitas barang dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip akad *ariyah* atau pinjam-meminjam dalam Islam. Dikarenakan tidak adanya sebuah akad yang mengharuskan untuk para penyewa kost mengganti apabila terjadi kerusakan. Jika terjadinya sesuatu pada barang pinjaman, peminjam tidak berkewajiban untuk mengganti barang tersebut. Namun dalam hal ini *ariyah* yang terjadi berlaku sebagai *yad dhamanah*, yang artinya peminjam wajib bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada barang pinjaman dalam kondisi apapun tidak peduli apakah disebabkan oleh kelalaian atau bukan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Naimah

Npm : 1621030054

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

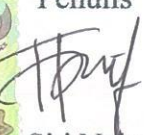
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TUNTUTAN FASILITAS BARANG (Studi Pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung)** adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyomotan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10-02-2021



Penulis


Siti Naimah
NPM.162103005



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tuntutan Fasilitas
Barang (Studi Pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab
Kelurahan Sukarame Bandar Lampung)”

Nama : Siti Naimah

NPM : 1621030054

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan di pertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP.196603301992031002

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
NIP.196901051998031003

Ketua Jurusan

Khoirudin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tuntutan Fasilitas Barang (Studi Pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung)". Oleh Siti Naimahi NPM 1621030054 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis 18 maret 2021

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Khoirudin, M.S.I

(.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I

(.....)

Penguji I : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

(.....)

Penguji III : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

(.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(An-Nisa:29)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat-Nya, atas rencananya yang begitu indah untuk penulis. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang begitu dalam penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta Sukiman dan Ekawati yang telah merawat, mendidik dan selalu mendoakan dengan sepenuh hati sebagai tanda bakti hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibu yang telah memberikan kasih sayang. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia dan bangga kepadaku, terimakasih untuk do'a, dukungan dan nasehat untuk menjadi orang yang lebih baik.
2. Adikku Sujoko Prawito yang selalu mendukung dan selalu memberi semangat kepadaku.
3. Keluarga besar Kakekku Alm. Kakek Wiryameja dan Alm. Kakek Wakimin yang selama ini memberikan do'a dan support kepadaku.

RIWAYAT HIDUP

Siti Naimah, dilahirkan di Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, pada tanggal 8 April 1998, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sukiman dan Ibu Ekawati. Pendidikan dimulai dari TK Aisyiyah Bustanul Athfal (Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur) lulus pada tahun 2004, SDN 1 Pugung Raharjo (Kecamatan sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur) lulus pada tahun 2010, SMPN 2 Sekampung Udik (Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur) lulus pada tahun 2013. SMAN 1 Sekampung Udik (Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur) lulus pada tahun 2016. Lalu melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar dan dapat selesai tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari kegelapan dan kejahiliyaan kepada alam yang penuh dengan kebudayaan dan peradaban serta berakidah kepada Allah SWT.

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Tuntutan Fasilitas Barang (Studi Pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pemikiran ke-Islaman dalam bidang hukum Islam. Serta untuk menambah *khazanah* keilmuan tentang transaksi muamalah yang semakin hari berkembang dengan pesat pada saat sekarang ini, juga untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dibidang Hukum Ekonomi Syariah pada Program Strata Satu di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari banyak sekali bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga penulisan skripsi dapat selesai seperti sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.SI Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. Iskandar Syukur, MA. selaku pembimbing I dan Bapak Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I Selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Muamalah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Perpustakaan Pusat Uin Raden Intan Lampung.
7. Sahabat - sahabat seperjuangan jurusan Muamalah serta teman-teman KKN 71 dan PPS yang telah sama - sama berjuang mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah.
8. Sahabat - sahabat terbaikku Reri Ilahi, Fatimah Putri, Rani Karenina,Anggi Makuf, Robby Satrio, Amruallah, Ibnu Azhari, Dicky Kurniawan, Fita Winda, Cherry Intan yang selalu memotivasi dan memberikan semangat kepadaku sampai menyelesaikan skripsi ini.

9. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dan akhirnya penulis hanya bisa berdoa semoga segala kebaikan yang telah diberikan hendaknya menjadi amal ibadah dan diberikan balasan oleh Allah SWT. Dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Bandar Lampung, 2021

Siti Naimah
NPM.1621030054



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Signifikansi Penelitian	7
H. Metode Penelitian.....	8

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	14
1. Akad Dalam Islam.....	14
a. Pengertian Akad	14
b. Dasar Hukum Akad	15
c. Rukun Dan Syarat Akad	16
d. Macam-Macam Akad	22
e. Asas Berakad Dalam Islam	25
f. Berakhirnya Akad	32
2. Pinjam-Meminjam (<i>Ariyah</i>)	33
a. Pengertian <i>Ariyah</i>	33
b. Dasar Hukum <i>Ariyah</i>	35
c. Rukun Dan Syarat <i>Ariyah</i>	37
d. Hukum Ketetapan Akad <i>Ariyah</i>	40
e. <i>Ihwal Ariyah</i>	46
f. Konsekuensi Hukum Akad <i>Ariyah</i>	48
B. Tinjauan Pustaka	51

**BAB III : GAMBARAN UMUM RUMAH KOST MUSLIMAH ULUL
ALBAB KECAMTAN SUKARAME BANDAR LAMPUNG**

- A. Gambaran Umum Kost Muslimah Ulul Albab Kecamatan
Sukarame Bandar Lampung 54
- B. Praktik Tuntutan Fasilitas Barang Pada Rumah Kost Muslimah
Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung 66

BAB IV : ANALISIS DATA

- A. Analisis Praktik Tuntutan Fasilitas Barang Pada Rumah Kost
Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung 76
- B. Tinjauan Praktik Tuntutan Fasilitas Barang Pada Rumah Kost
Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung 79

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 87
- B. Rekomendasi..... 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 : Data Kos-Kosan Selingkungan Kaling I Sampai Kaling II Korpri
- Tabel 3.2 : Data Nama-Nama Penyewa Yang Ada Di Kos Putri Bunda Jalan Raflesia
- Tabel 3.3 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
- Tabel 3.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
- Tabel 3.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
- Tabel 3.6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
- Tabel 3.7 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Bagan 3.8 : Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sukarame
- Tabel 3.8 : Berikut Data Responden Pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penulis akan menyajikan judul skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Tuntutan Fasilitas Barang (Studi Pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung)** untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul tersebut maka perlu kiranya penulis mempertegas dan memberikan penjelasan baik maksud maupun istilah-istilah yang terkandung dalam judul di atas secara rinci sehingga dapat dimengerti dan diminati untuk dibahas oleh pembaca. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-Quran atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu yang masalah atau persoalan baru yang timbul terus menerus harus dicari jawabannya melalui *ijtihad* dan wujudnya dari hasil *ijtihad* tersebut disebut *fiqh*.¹ Adapun pengertian lain, hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran (Hukum syara).²

¹Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim*, (Yogyakarta: LkiS, 2016), h. 197.

²Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet, Ke-5, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007), h.169.

2. Tuntutan

Tuntutan berasal dari kata dasar tuntut. Sinonim tuntutan adalah ultimatum, ancaman, peringatan, klaim, permintaan, permohonan, keputusan. Jadi tuntutan adalah hasil menuntut sesuatu yang dituntut (seperti permintaan keras).³

3. Fasilitas

Fasilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sarana untuk dapat melaksanakan fungsi sebagai suatu bentuk kemudahan.⁴

4. Barang

Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad) seperti alat perkakas rumah, perhiasan, dan sebagainya.⁵

Berdasarkan beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam tentang tuntutan atas kerusakan barang yang dipinjam tanpa akad pada rumah kost muslimah ulul albab di Sukarame Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul skripsi **Tinjauan Hukum Islam Tentang Tuntutan Fasilitas Barang (Studi Pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung)**, yaitu sebagai berikut:

³ <http://leksture.id>

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.109

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*,, h. 47.

1. Alasan Objektif

Masalah yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya indikasi yang tidak sesuai pada awal kesepakatan pinjam meminjam terhadap kerusakan barang yang dipinjam sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

2. Alasan Subyektif

Berdasarkan aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dari pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya.⁶ Karena itu manusia sangat menekankan kemanusiaan. Hukum Islam (syari'ah) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku dimasa lampau, masa kini dan akan tetap berlaku di masyarakat.⁷

Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer atau pokok dalam hal ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut, selain dengan dilakukannya suatu transaksi yang disebut dengan jual beli cara lain yang dapat dilakukan yaitu

⁶Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997), h. 71

⁷Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 27.

dengan dilakukannya suatu proses pinjam meminjam atau yang dalam istilah muamalah lebih dikenal dengan istilah *al-ariyah*, proses peminjaman ini biasanya dilakukan oleh seseorang dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah hal ini karena proses pinjam-meminjam dianggap sebagai suatu alternatif ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok secara kontan.

Tujuan utama adanya suatu proses pinjam-meminjam adalah untuk menolong sesama, sehingga ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan tujuan untuk menolong atau membantu sesama maka itu akan bernilai ibadah, namun jika pemberian pinjaman tersebut bukan didasari dengan adanya keinginan untuk menolong sesama maka hukumnya akan berbeda. Sebagaimana yang terjadi pada pemilik Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung dimana pemilik kost meminjamkan sebuah kulkas untuk dapat digunakan oleh beberapa anak penyewa kostnya dengan tujuan untuk menyimpan berbagai sayuran, minuman dan beberapa keperluan lain.

Tujuan utama pinjam-meminjam atau *ariyah* yang dilakukan oleh pemilik Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung tersebut dilakukan yaitu untuk membantu penyewa kostnya. Sebagaimana ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا

عَلَى الْبَرِّ وَالْتَّقَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa setiap umat muslim untuk dapat melakukan tolong menolong yang didasarkan atas keikhlasan dari masing-masing pihak. Dan setiap muslim dituntut untuk selalu berbuat baik kepada sesama, dan kebaikan yang dimaksud adalah segala bentuk perbuatan baik lahir atau batin yang bertujuan kepada mencari ridha Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Allah SWT bahwa segala bentuk perbuatan baik akan dibalas oleh Allah dengan hal yang baik pula.

Namun transaksi pinjam-meminjam yang dilakukan oleh pemilik Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung dengan penyewa kost tersebut tidak dijelaskan dalam akad apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam memakai barang pinjaman tersebut. Sehingga menimbulkan suatu perselisihan dikarenakan adanya suatu keharusan untuk pergantian barang pinjaman baru akibat adanya kerusakan namun tidak disebabkan oleh kedua belah pihak. Melainkan

disebabkan oleh umur barang, arus listrik yang tidak stabil serta lama pakai dari barang *ariyah* atau pinjaman tersebut.

Dengan demikian penulis berargumen bahwa tuntutan atas kerusakan barang yang dipinjam layak untuk di bahas dengan melihat adanya perintah dalam Islam bahwa setiap orang harus melakukan tolong-menolong yang harus didasarkan atas keikhlasan dan memenuhi prestasi sebagaimana akad atau perjanjian yang telah dibuat. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hal ini, yang penulis teliti terkait dengan tuntutan atas kerusakan barang yang dipinjam tanpa akad, yaitu ketika melakukan proses *ariyah* atau pinjam-meminjam yang disertai dengan pemaksaan pergantian barang baru yang mengakibatkan keterpaksaan salah satu pihak.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa proses *ariyah* atau pinjam-meminjam yang terjadi pada rumah kost terjadi sebagaimana minjam-meminjam lainnya. Penelitian ini difokus pada Tuntutan Atas Kerusakan Barang Yang Dipinjam Tanpa Akad (studi pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung). Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah pemilik kost yang meminjamkan barang atau yang melakukan transaksi *ariyah* dan yang meminjam barang yaitu kulkasdi Rumah Kost Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung.

2. Batasan masalah pada penelitian ini adalah Praktik Tuntutan Atas Kerusakan Barang Pinjaman Tanpa Akad Di Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarama, Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tuntutan fasilitas barang pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarama Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik tuntutan fasilitas barang tersebut?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik tuntutan fasilitas barang pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarama Bandar Lampung?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik tuntutan fasilitas barang tersebut ?

G. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu memberikan informasi dan pemahaman terkait dengan praktik pinjam meminjam barang yang terjadi pada anak kost Muslimah Ulul Albab. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisa data sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas suatu topik atau permasalahan tertentu yang menjadi titik fokus utama penelitian.⁸ Secara lebih luas dikatakan bahwa metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyampaikan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan.⁹

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. metode penelitian ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. Kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap

⁸ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2.

⁹ Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara 2012), h. 8

pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁰ Alasan mengapa menggunakan metode ini karena untuk mengkaji praktik pinjam meminjam barang yang sering terjadi pada anak kost dengan konsep hukum Islam.

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹¹ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di rumah kost mengenai praktik pinjam meminjam barang yang terjadi kerusakan. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹²

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, data yang diperoleh kemudian akan dianalisa deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik kerusakan barang yang dipinjam diganti dengan barang baru ditinjau dari hukum Islam.

¹⁰ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 3.

¹¹ *Ibid.*, h. 9.

¹² *Ibid.*

3. Data dan Sumber Data

Fokus pada penelitian ini yaitu lebih mengarah pada persoalan tinjauan hukum Islam tentang tuntutan atas kerusakan fasilitas barang yang dipinjam diganti dengan barang baru. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹³ Dalam hal ini sumber penelitian yaitu dengan wawancara pada pihak yang memiliki barang dan yang meminjam barang tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu guna menunjang melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah objek yang akan menjadi target untuk sasaran keberlakuan suatu penelitian.¹⁵ Keseluruhan objek yang diteliti yaitu

¹³ Pabundu Tika Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta Bumi Aksara, 2006), h.57.

¹⁴ Sugiana, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 218.

¹⁵ S, Margon, *Metode Penelitian Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta 1997) h. 158

seerti manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun populasi dalam objek ini adalah 1 orang pemilik barang (kulkas) dan 8 orang yang meminjam.

b. Sampel

Sehubung jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang, maka seluruh jumlah populasi dijadikan sebagai objek penelitian, sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi.¹⁶ Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.¹⁷ Maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 9 orang.

5. Metode Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁸ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik pinjam meminjam barang di rumah kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 134.

¹⁷Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 118

¹⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 9.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah salah satu alat pengumpul data yang dilakukan secara langsung dengan narasumber. Adapun pengertian lain dari wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).¹⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Jadi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.²⁰

6. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya ialah pengolahan data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kelengkapan semua data yang diperoleh, kejelasan makna, kesesuaian antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²¹
- b. *Organizing* yaitu menyusun kembali data yang didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²²

¹⁹ Abdul Kodir Muhammad, *Hukum Dan Peneliti Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

²⁰ Eta Mamang Sangadji dan Sipiah, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

- c. Sistematika Data (*sistemazing*) yaitu data ini bertujuan untuk menentukan, menempatkan data yang menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.²³ Dengan cara ini dapat dikelompokkan data yang telah diedit kemudian diberi tanda dan urutan masalah.

7. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengolah data yang sudah terkumpul dengan cara mengklarifikasikan data semua jawaban untuk di analisis. Data yang diperoleh di lapangan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif. Teknik analisa kualitatif yaitu di gambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif, berfikir deduktif yaitu metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), h. 243.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum....*, h. 56.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Akad Dalam Islam

a. Pengertian Akad (الْعَقْدُ)

Menurut bahasa “akad” (العقد) jamaknya *al-‘uqud* (العُقُود) mempunyai dua pengertian, yakni secara hissi dan ini merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan (الشَّدُّ), mengikat (الربط). Kebalikannya adalah berarti melepaskan (الحَلُّ). Dan secara maknawi, dan ini merupakan makna kiasan yang dipinjam dari makna asli, yang berarti mengkokohkan (الثَّوْتِيقُ), menguatkan (الْيُؤَكِّدُ), menjamin (الضَّمَانُ), dan berjanji (العَهْدُ).²⁴

Istilah akad dalam hukum Indonesia adalah perjanjian yang terdapat beberapa definisi dari akad itu sendiri:

- 1) Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan pertemuan yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
- 2) Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²⁵

²⁴Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 1-2.

²⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

- 3) Adapun makna akad secara syar'i yaitu "Hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibolehkan oleh syari'at yang mempunyai pengaruh secara langsung." Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan kabul.²⁶
- 4) Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan dari kondisi pertama kepada kondisi baru. Dibatasinya makna ikatan harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat.²⁷

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa akad itu sendiri adalah suatu ikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam melakukan suatu perjanjian atau suatu kegiatan yang mana akad tersebut akan mengikat kedua belah pihak sampai batas waktu yang ditentukan dalam akad.

b. Dasar Hukum Akad

Firman Allah SWT berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٦﴾

²⁶Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 17.

²⁷*Ibid.*,

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S Al-Maidah (5): 1).

Firman Allah SWT berikut ini:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”(Q.S Al-Isra’(17): 34)

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

a) Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*)

Para pihak yang membuat akad harus mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk melakukan akad.

b) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*),

“Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan

akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.”²⁸

“Rukun akad menurut kalangan Hanafiyah adalah *sighat aqad*, yaitu ijab dan kabul karena hakikat dari akad adalah ikatan antara ijab dan kabul. Sedangkan Rukun aqad menurut Jumhur Fuqaha’ selain Hanafiyah terbagi menjadi tiga yaitu *aqidain* (dua orang berakad), *ma’aqud alaihi* (objek akad) dan *sighat aqad* (ijab dan kabul).”²⁹

c) Objek akad (*mahallul-‘aqd*)

Objek akad (*Ma’uqud ‘alaihi*) disyaratkan bahwa: “... dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (dapat dikuasai dan dimiliki)...” Jika ada suatu akad seperti jual beli tapi objek akad tidak bisa dikuasai seperti akad terhadap sesuatu yang tidak ada, Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi maupun immateri.

d) Tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*).

Maksud para pihak ketika membuat akad. Dengan keharusan akad yang dibuat harus sejalan dengan kehendak syara’.

2) Syarat Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi syarat akad yang dibedakan menjadi empat macam yaitu:³⁰

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 46.

³⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 97-104.

a) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al- in 'iqad*) antara lain:³¹

- (1) *Tamyiz*,
- (2) Berbilang pihak (*at-ta'adud*),
- (3) Persesuaian *ijab* dan *qabul* (kesepakatan)
- (4) Kesatuan majelis akad,
- (5) Objek akad dapat diserahkan,
- (6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
- (7) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwin* dan *mamluk*),
- (8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

b) Syarat-Syarat Keabsahan Akad (*Syuruth ash-Shihhah*)

Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad memerlukan unsur-unsur penyempurn yang menjadikan suatu akad sah, unsur sahnya suatu akad itu disebut syarat penyempurnaan suatu akad. Syarat-syarat keabsahan akad dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- (1) Syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad.
- (2) Syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

³¹Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam....*, h. 95-98.

c) Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syuruth an-Nafadz*)

Untuk dapat dilakukannya akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu:

- (1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, terpenuhinya dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sering digadaikan atau disewakan.
- (2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya.

d) Syarat Mengikatnya Akad (*Syarthul-Luzum*)

Pada dasarnya akad yang telah memenuhi rukunnya serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat hukumnya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

Secara global akad harus terhindar dari enam macam '*aib*:

1) Ketidak jelasan (*Jahalah*)

Ketidak jelasan yang dimaksud disini adalah ketidak jelasan yang mendatangkan perselisihan yang sulit di selesaikan. Ketidak jelasan ada empat macam, yaitu:³²

- a. Ketidak jelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli
- b. Ketidak jelasan harga
- c. Ketidak jelasan masa (tempo) seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam khiyar syarat. Dalam hal ini harus jelas jika tidak jelas maka akad menjadi batal
- d. Ketidak jelasan dalam langkah-langkah penjaminan.

2) Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Pemaksaan adalah mendorong orang lain yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.

Paksaan ada dua macam:³³

- a. Paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat.
- b. Paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikan jual beli yang *fasid* menurut jumhur Hanafiah dan *mauquf* menurut Zufar.³⁴

³²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 190.

³³*Ibid.*

3) Pembatasan dengan Waktu (*At-Tauqit*)

Jual beli dengan pembatasan waktu hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktu.

4) Penipuan (*Al-Gharar*)

Gharar yang dimaksud disini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang.

5) Kemudharatan (*Adh- Dharar*)

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad.

6) Syarat yang merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.³⁵

Menurut Prof. Dr. Fathurahman Djamil,

“Dalam pembuatan perjanjian bisnis harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan waktu perjanjian, bahwa baik bermula atau berakhirnya perjanjian, jangka waktu angsuran, dan berakhirnya harus diketahui dan disepakati oleh para pembuat akad. Tidak boleh berubah di tengah atau ujung

³⁴*Ibid*, h.191

³⁵*Ibid*, h. 192.

perjalanan pelaksanaan kesepakatan kecuali hal itu disepakati oleh para pembuat akad.”³⁶

d. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi dua, yaitu:

- 1) Berdasarkan sifat akad secara syariat dibagi menjadi 2 yaitu:
 - a) *Akad Sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad yang sahih ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:
 - (1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - (2) Akad *mawquf*, yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak mempunyai kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayyiz.³⁷
 - b) *Akad yang tidak sahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), h.75.

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 106-108.

yang berakad. Kemudian ulama Hanifiyah membagi akad yang tidak sah ini menjadidua macam yaitu:

- (1) Akad yang *batil*, suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'.
- (2) Akad *fasid* menurut mereka adalah suatu akad yang pada dasarnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.³⁸

2) Berdasarkan bernama atau tidaknya akad terbagi menjadi:

a) Akad *Musamanah*

Yaitu akad yang ditetapkan nama-namanya oleh syara' dan dijelaskan pula hukum-hukum, seperti: *bai'*, *ijarah*, *syirkah*, *hibah*, *kafalah*, *wakalah*, dan lain sebagainya.

b) Akad *Ghairu Musamanah*

Yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh syara' dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat seperti, *Aqad istishna' bai 'al-wafa'*.³⁹

³⁸*Ibid.*,

³⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Dyariah "Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah"*...., h. 59.

3) Berdasarkan Motifnya

Berdasarkan motifnya akad dibagi menjadi:

a) Akad *Tijarah*

Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena ini bersifat komersil. Seperti jual beli, upah mengupah dan lain sebagainya.

b) Akad *Tabarru'* (*gratutions contract*)

Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit transaction* (transaksi nirbala). Akad *tabarru'* dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad *tabarru'* adalah dari sisi Allah SWT bukan dari manusia. Seperti *qard, wad'ah, rahn, kafalah*, dan lain sebagainya.⁴⁰

4) Berdasarkan Sifat Benda

Berdasarkan sifat bendanya akad terbagi menjadi:

a) Akad *'ainiyah*

Yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti *hibah, ariyah, rahn* dan lain sebagainya.

⁴⁰Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 60-61.

b) Akad *Ghairu 'ainiyah*

Yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tepatnya *sighat* akad. Menimbulkan akad tanpa butuh serah terima barang. mencakup seluruh akad selain akad *ainiyah*, seperti akad amanah.⁴¹

5) Berdasarkan Unsur Tempo Dalam Akad

Berdasarkan unsur tempat dalam akad dibagi menjadi:

a) Akad *al-zamani* (akad bertempo)

Yaitu akad yang didalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, seperti akad upah sewa-menyewa, akad penitipan dan akad pinjam meminjam. Yang kesemuanya memerlukan perjanjian atas lamanya suatu pinjaman atau titipan atau sewa.

b) Akad *al-fairui* (akad tidak bertempo)

Yaitu akad dimana unsur tidak merupakan waktu tidak merupakan bagian dari suatu perjanjian. Seperti jual beli yang dapat terjadi seketika tanpa adanya unsur tempo dalam akad tersebut.⁴²

e. Asas Berakad Dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Fundamen (alas,

⁴¹*Ibid.*, h. 62.

⁴²*Ibid.*, h. 91-92.

dasar) bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan fundamental dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya.⁴³ Dimana asas berakad dalam Islam antara lain:

1) Asas Ilahiah

Asas ilahiah, menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi kepada dua bagian, yaitu *Tauhid Uluhiyah* dan *Tauhid Rububiyah*. *Tauhid uluhiyah* yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan langit adalah milik-Nya, sedangkan *Tauhid rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya. Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya ke arah keberhasilan.⁴⁴

2) Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad) pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Jawa Timur: Bayumedia Pubhlishing, 2005), h. 238.

Landasan asas ini yakni Q.S Al-Baqarah (2): 265; Al-Maidah (5): 1; Al- Hijr (15): 2; Ar-Run (30): 95; An-Nisa' (4): 33 dan 72. Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَكَاتَتْ أَكْطُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

Artinya: “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.” (Q.S Al-Baqarah (2): 265.)

3) Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.

Seperti Firman Allah SWT berikut ini:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu.”(Q.S An-Nahl (16): 71)

Hal ini menunjukkan, bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurnagan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

4) Asas Keadilan (*Al-'Adalah*)

Dalam Firman Allah Q.S Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah SWT berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”(Q.S Al-Hadid (57): 25)

Adil adalah salah satu sifat Allah SWT. Yang seringkali disebutkan dalam Al-Qur'an, bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan pada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil lebih menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah (5): 8)

Sikap adil harus selalu tercermin dalam perbuatan muamalat.

Oleh karena itu. Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebutkan juga dengan kezaliman.

Penangguhan pembayaran utang bagi mereka yang mampu adalah suatu perbuatan yang zalim pula, karena ia telah mengingkari janji (pelunasan) dan menahan hak orang lain yang menjadi kewajiban bagi dirinya.⁴⁵

5) Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Dalam Firman Allah Q.S An-Nisa' (4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil

⁴⁵Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafiduddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cet. I, (Rabbani Press, 1997), h. 396.

(*al-aqdu bil bathil*). Berikut isi dari Firman Allah tentang asas kerelaan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa’(4): 29)

Ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan haendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidakkah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukaarela ini menunjukkan keikhlasan dan ikhtikad para pihak.

6) Asas kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiqi*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perkatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika ketidakjujuran ini tidak diterapkan dalam peikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Firman Allah SWT berikut ini:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَعََاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar” (*Q.S Al-Ahzab* (33): 70)

Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan-perbuatan muamalat yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.

7) Asas Tertulis (*Al- Kitabah*)

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.⁴⁶

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:⁴⁷

- a) *Iktiyari*/Sukarela,
- b) *Amanah*/Menepati janji,

⁴⁶Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*..., h. 98.

⁴⁷*Ibid.*, h. 98-99.

- c) *Ikhtiyati*/Kehati-hatian,
- d) *Luzum*/Tidak Berubah,
- e) Saling Menguntungkan,
- f) *Taswiyah*/Kesetaraan,
- g) Transparansi,
- h) Kemampuan,
- i) *Taisir*/Kemudahan,
- j) Ikhtikad baik
- k) Sebab yang Halal.

f. Berakhirnya Akad

Sebab-sebab yang menjadikan berakhirnya akad terbagi kepada dua bagian, yaitu karena kehendak orang yang berakad (*ikhtiyariyah*) dan karena darurat (*dharuriyah*).

1) Sebab *ikhtiyariyah*

Yang termasuk ke dalam sebab tersebut adalah *fasakh*, *iqalah*, dan berakhirnya waktu atau pekerjaan yang telah ditentukan dalam akad, seperti dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*).

2) Sebab *Daruriyah*

Yang termasuk ke dalam sebab daruriyah tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Rusaknya objek akad (*ma'qud 'alaih*), seperti dalam akad sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*) dengan rusaknya kendaraan dan robohnya rumah akan disewakan, sehingga tidak

bisa dimanfaatkan. Begitu juga rusaknya benda yang akan dipinjamkan dalam akad *'ariyah* dan rusak benda yang dititipkan dalam akad *wadi'ah* atau hilangnya modal dalam akad *syirkah*.

b) Berakhirnya akad karena peristiwa yang tidak diduga, seperti karena meninggal dunia satu pihak atau keduanya, atau karena adanya udzur yang tidak memungkinkan dapat melanjutkan akad dengan sempurna.

c) Dirampas (*ghasab*) atau dicuri objek akad oleh orang lain.⁴⁸

2. Pinjam-Meminjam (*Ariyah*)

a. Pengertian *Ariyah*

Menurut etimologi, *ariyah* adalah (العَارِيَّة) diambil dari kata (عَارَ) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, *ariyah* berasal dari kata (التَّعَاوُزُ) yang sama artinya dengan (التَّنَاوُلُ وَالْتَّنَاوُبُ) (saling menukar dan mengganti), yakni dalam arti pinjam-meminjam.⁴⁹ Pinjam-meminjam diartikan memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.⁵⁰ Sedangkan menurut istilah *ariyah* ada beberapa pendapat:

⁴⁸Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*...., h. 26-28.

⁴⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 139

⁵⁰K Lubis Suhrawardi, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2012), h. 136

- 1) Menurut Hanafiyah: Memiliki manfaat secara cuma-cuma.
- 2) Menurut Malikiyah: Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
- 3) Menurut Syafi'iyah: Kebolehan untuk mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya yang mungkin untuk dapat dimanfaatkan serta tetap mendapatkan zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
- 4) Menurut Hanabilah: Kebolehan untuk dapat memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.⁵¹

Ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.⁵²

Akad ini berbeda dengan hibah, karena *ariyah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari suatu benda, sedangkan hibah mengambil zat benda tersebut. Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain demi terciptanya kegiatan pinjam-meminjam secara benar yang sesuai dengan prinsip dan tujuan Ekonomi Islam.

⁵¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 91

⁵²Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.139

Ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Hal ini karena nilai Islam tidak hanya untuk kehidupan muslim, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai pada tujuan agama (*falah*). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa.⁵³

b. Dasar Hukum *Ariyah*

1) Al-Quran

Salah satu ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum *al-ariyah* adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah (5): 2)

⁵³Boedi Abdullah, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.29

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa (4): 58)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap muslim dituntut untuk selalu berbuat baik kepada sesama, dan kebaikan yang dimaksud adalah segala bentuk perbuatan baik lahir atau batin yang bertujuan kepada mencari ridha Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Allah bahwa segala bentuk perbuatan baik akan dibalas oleh Allah dengan hal yang baik pula, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat berikut:

﴿قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

Artinya: “Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu". orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.”(QS. Az-Zumar (39): 10)

Berdasarkan beberapa ayat di atas, dapat diketahui bahwa hukum dari memberikan pinjaman adalah sunah dan bernilai pahala

selama hal itu bertujuan untuk menolong sesama, namun bisa saja menjadi wajib jika dalam keadaan darurat dan kepada orang yang memang benar benar membutuhkan, seperti meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati, namun memberikan pinjaman juga bisa menjadi haram jika barang yang dipinjamkan tersebut diketahui akan dipergunakan untuk hal yang tidak baik atau mencelakakan orang lain.

2) Hadits

Hadits terkait tentang *ariyah*:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَ هَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلًا فَهِيَ أَتْلَفُهُ اللَّهُ (رواه البخاري)⁵⁴

Artinya: “Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya, maka Allah akan membayarnya, barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya.” (Riwayat Bukhari)

Para Imam Madzhab sepakat peminjaman barang (*ariyah*) merupakan ibadah yang disunahkan serta diberi pahala.

c. Rukun Dan Syarat *Ariyah*

1) Rukun *Ariyah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ariyah* hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan *qabul* bukan merupakan rukun *ariyah*. Menurut ulama Syafi’iyah, dalam *ariyah* disyaratkan adanya lafazh *sighat akaf*, yakni ucapan ijab dan qabul

⁵⁴Syaikh al-‘Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh ‘Abdurrahman li ath-Thiba’ah, dari judul asli *Rahmah al-Ummah Muhammad*, (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 263

dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bertanggung tanpa adanya izin.⁵⁵

Secara umum, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun *ariyah* ada empat, yaitu:⁵⁶

- a) *Mu'ir* (yang meminjam)
- b) *Musta'ir* (yang meminjamkan)
- c) *Mu'ar* (barang yang dipinjam)
- d) *Shighat*, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

2) Syarat *Ariyah*

Ulama fiqih mensyaratkan dalam akad *ariyah* sebagai berikut:

- a) *Mu'ir* Berakal Sehat

Dengan demikian, orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama hanafiah tidak mensyaratkan sudah *baligh*, sedangkan para ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan kehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh, dan bukan orang yang sedang pailit (bangkrut).

⁵⁵ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II, h. 266

⁵⁶ *Ibid.*, h. 264

b) Pemegangan Barang Oleh Peminjam

Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang pinjaman, seperti halnya dalam hibah.

c) Barang (*musta'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya
Jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah.

Para ulama telah menetapkan bahwa *ariyah* dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang, dan lain lain.

Meminjam senjata dan kuda kepada musuh hukumnya haram, demikian juga diharamkan meminjamkan Al-Quran atau yang berkaitan dengan Al-Quran kepada orang kafir, juga dilarang meminjamkan alat berburu kepada orang yang sedang *ihram*.

d) Barang yang dipinjamkan itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam.

Para ulama telah menetapkan bahwa *ariyah* dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang, dan lain-lain. Meminjam senjata dan kuda kepada musuh hukumnya haram, demikian juga diharamkan meminjamkan Al-Quran atau yang berkaitan dengan Al-Quran kepada orang kafir.

Juga dilarang meminjamkan alat berburu kepada orang yang sedang *ihram*.

- e) Barang yang dipinjamkan itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam

Dalam akad atau transaksi *ariyah* pihak peminjam harus menerima langsung barang itu dan dapat dimanfaatkan secara langsung.⁵⁷

d. Hukum Ketetapan Akad *Ariyah*

1) Dasar Hukum *Ariyah*

Menurut kebiasaan (*urf*), *ariyah* dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara *hakikat* dan secara *majaz*.

a) Secara Hakikat

Ariyah adalah meminjamkan barang yang dapat untuk diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun, atau peminjam memiliki sesuatu yang memaksa dengan manfaat menurut kebiasaan.⁵⁸

Al-Kurkhi, ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ariyah* adalah kebolehan untuk mengambil manfaat dari suatu benda.

Berdasarkan perbedaan di atas, dapat disimpulkan bahwa golongan pertama, barang yang dipinjam (*musta'ar*) boleh

⁵⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: FajarInterpratama Offset, 2010), h. 250.

⁵⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...., h. 142.

dipinjamkan kepada orang lain, bahkan menurut Imam Malik, sekalipun tidak diizinkan oleh pemiliknya asalkan digunakan sesuai fungsinya. Akan tetapi, ulama Malikiyah melarangnya jika peminjam tidak mengizinkannya.

Alasan ulama Hanafiyah antara lain bahwa yang memberi pinjaman (*mu'ir*) telah memberikan hak penguasaan barang kepada peminjam untuk mengambil manfaat barang. Kekuasaan seperti itu berarti kepemilikan. Dengan demikian, peminjam berkuasa penuh untuk mengambil manfaat barang tersebut, baik oleh dirinya maupun orang lain.

Menurut golongan kedua, pinjam-meminjam atau *ariyah* hanya sebatas pengambilan manfaat saja maka tidak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain, seperti halnya seorang tamu yang tidak boleh meminjamkan sebuah makanan yang dihidangkan untuknya kepada orang lain.

Golongan pertama dan kedua sepakat bahwa peminjam tidak memiliki hak kepemilikan sebagaimana pada gadai barang. Akad pinjaman statusnya tidak mengikat, maka barang yang dipinjam kemudian dijaminkan, maka pinjaman yang ada batal. Menurut golongan kedua, peminjam hanya berhak memanfaatkannya saja dan tidak memiliki bendanya. Adapun menurut golongan pertama, gadai adalah akad yang lazim (resmi), sedangkan *ariyah* adalah akad *tabarru* (derma) yang

dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan demikian, peminjam tidak memiliki hak kepemilikan, sebagaimana pada akad lazim sebab hal itu akan mengubah tabiat *ariyah*. Selain itu, peminjam pun tidak boleh menyewakannya.⁵⁹

b) Secara *Majazi*

Ariyah secara *majazi* adalah pinjam-meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan, dan lain-lain, seperti telur, uang, dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya, tanpa merusak zatnya. *ariyah* pada benda-benda tersebut harus diganti dengan benda yang serupa atau senilai.

Walaupun termasuk *ariyah*, tetapi merupakan *ariyah* secara *majazi*, sebab tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu, sama saja antara memiliki kemanfaatan dan kebolehan untuk memanfaatkannya.⁶⁰

2) Hak Memanfaatkan Barang Pinjaman (*Musta'ar*)

Jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *musta'ar* dapat mengambil manfaat barang sesuai dengan izin *mu'ir* (orang yang memberipinjaman).

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewenangan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh *musta'ar* bergabung pada

⁵⁹Alaud Din Al-Hushkaffi, *Ad-Durul Mukhtar.*, Juz IV, h. 525

⁶⁰Alauddin Al-Kasani., *Badai' Ash-Shanai' Fi Tartib Syara'*, Juz V, h. 251.

jenis pinjaman, apakah *mu'ir* meminjamkannya secara terikat (*muqayyad*) atau mutlak.

a) *Ariyah* mutlak

Ariyah mutlak, yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.

b) *Ariyah muqayyad*

Ariyah muqayyad adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut, serta melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلًا فَهَا أَتْلَفُهُ اللَّهُ. (رواه البخاري)⁶¹

Artinya : “Abdul Aziz bin Abdillah Al-Uwais: meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Sauri bin Zaid, dari Abi Ghos, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda “Barang siapa yang mengambil harta seseorang dengan maksud membayarnya, Allah akan membayarkannya dan barang siapa mengambil dan bermaksud

⁶¹Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhori*, (Beirut-Lebanon: DarAl-Kutub Al Ilmiyah, 2004), h. 430.

melenyapkannya maka Allah akan melenyapkannya” (HR. Bukhari no. 2387).

Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang. Dengan demikian, dibolehkan untuk melanggar batasan tersebut apabila kesulitan untuk memanfaatkannya.⁶²

(1) Batasan Penggunaan *ariyah* oleh diripeminjam

Jika *mu'ir* membatasi hak penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang atau memakai pakaian.

(2) Pembatasan waktu atau tempat

Apabila *ariyah* dibatasi waktu dan tempat, kemudian peminjam melewati tempat atau menambah waktunya, siapa bertanggung jawab atas penambahan tersebut. Dalam hal waktu peminjaman, jika pihak peminjam sudah mampu untuk mengembalikannya, maka diutamakan untuk segera mengembalikannya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً⁶³

Artinya: “Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang baik dalam pembayaran utangnya”.

⁶² *Ibid.*, h. 144.

⁶³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga 2014), h.766

(3) Pembatasan ukuran berat dan jenis

Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.

Apabila ada perbedaan pendapat antara *mu'ir* (orang yang meminjamkan barang) dengan *musta'ir* (peminjam) tentang lamanya waktu meminjam, berat barang yang dibawa barang pinjaman, atau tempat meminjam, pendapat yang harus dimenangkan atau diterima adalah pendapat *mu'ir* (yang meminjamkan barang). Karena dialah yang pemberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya.

3) Sifat Ariyah

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan peminjaman atas barang adalah hak tidak lazim sebab merupakan kepemilikan yang tidak ada penggantinya. Pada hibah, misalnya bisa saja *mu'ir* (orang yang meminjamkan) mengambil barang yang dipinjamkan kapan saja, sebagaimana peminjam dapat mengembalikannya kapan saja, baik pinjam meminjam itu bersifat mutlak atau dibatasi waktu, kecuali ada sebab-sebab tertentu, yang akan menimbulkan kemadaratan saat pengembalian barang tersebut.

Seperti kalau dikembalikan kepada waktu yang telah ditentukan barang akan rusak atau seperti orang-orang yang meminjam tanah atau mengubur mayat yang dihormati, maka *mu'ir* tidak boleh meminta tanah tersebut kembali dan tidak boleh mengembalikannya sebelum jenazah berubah menjadi tanah.⁶⁴

Menurut pendapat yang paling *masyur* dari ulama Malikiyah, *mu'ir* tidak dapat meminta barang yang dipinjamkannya sebelum peminjam dapat mengambil manfaatnya. Jika *ariyah* ditinggalkan pada suatu waktu, *mu'ir* yang paling unggul menurut Ad-Dardir, dalam kitab *syarah Al-Kabir*, adalah *mu'ir* dapat meminta barang yang dipinjamkannya secara mutlak kapanpun ia menghendakinya.

Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa ulama Malikiyah membolehkan untuk mengembalikan pinjaman kalau akadnya bersifat umum. Ada pun jika akad dibatasi oleh syarat, waktu, atau adat, mereka melarangnya.

e. **Ihwal Ariyah**

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang pinjaman itu merupakan amanat bagi peminjam, baik dipakai maupun tidak. Dengan demikian, dia tidak menanggung barang tersebut jika terjadi kerusakan, seperti juga dalam sewa menyewa atau barang titipan, kecuali bila kerusakan tersebut disengaja atau disebabkan kelalaian. Hal ini karena tanggungan tidak dibebankan kepada mereka yang bukan pelaku.

⁶⁴*Ibid.*, h. 216.

Selain itu, peminjam pun dikategorikan sebagai orang yang menjaga milik orang, hal itu termasuk kebaikan bagi pemilik.⁶⁵

1) *Mu'ir* mensyaratkan peminjam harus bertanggungjawab

Ulama Hanafiyah berpendapat, jika *mu'ir* memberikan syarat adanya tanggungan kepada peminjam, syarat tersebut batal. Begitu juga pada penitipan. Hal itu mensyaratkan tidak adanya tanggung jawab pada sewa-menyewa sebab persyaratan tersebut mengubah inti akad.

Menurut ulama Malikiyah, jika *mu'ir* mensyaratkan peminjam untuk bertanggung-jawab pada sesuatu yang bukan pada tempatnya, peminjam tidak menanggungnya. Hanya saja ia harus memberikan bayaran atas pemakaian barang yang dipinjamnya sesuai dengan nilainya. Akad pun berubah menjadi sewa-menyewa fasid (rusak), jika *mu'ir* tidak rela meminjamkannya, kecuali peminjam bersedia untuk menanggungnya.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, jika peminjam mensyaratkan *ariyah* sebagai amanat bukan tanggungan, tanggungan tidak gugur dan syarat batal, sebab setiap akad mengharuskan adanya tanggungan tidak dapat diubah dengan syarat, seperti penyerahan atau pemahaman barang pada jualbeli, baik jual-beli *sahih* maupun *fasid*.

⁶⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*..., h. 149.

2) *Ariyah* berubah dari amanah kepada tanggungan

Menurut ulama Hanafiyah, penyebab perubahan *ariyah* dari amanah kepada tanggungan karena diantara keduanya ada beberapa persamaan, seperti penyebab perubahan tersebut pada penitipan barang, yaitu dengan sebab-sebab sebagai berikut:⁶⁶

- a) Menghilangkan barang.
 - b) Tidak menjaganya ketika menggunakan barang.
 - c) Menggunakan barang pinjaman yang tidak sesuai dengan persyaratan atau kebiasaan yang berlaku.
 - d) Menyalahi tata cara penjagaan yang seharusnya.
- ## 3) Biaya pengembalian barang

Biaya pengembalian barang pinjaman itu ditanggung oleh peminjam sebab pengembalian barang merupakan kewajiban peminjam yang telah mengambil manfaatnya.

f. Konsekuensi Hukum Akad *Ariyah*

1) Bagi Peminjam

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (*mu'ir*), setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak membayar utang, bahkan melalaikan membayar utang juga termasuk aniaya, dan hal tersebut termasuk dalam salah satu perbuatan dosa.⁶⁷

⁶⁶*Ibid.*, h. 151

⁶⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 9

Apabila meminjam barang dari orang lain, maka boleh untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai kesepakatan agar pinjam-meminjam dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak maka peminjam berkewajiban:⁶⁸

- a) Menjaga barang pinjaman dengan baik
- b) Memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya
- c) Tidak meminjamkan barang pinjaman pada oranglain, kecuali mendapat izin dari pemilik barang.
- d) Mengembalikan barang yang dipinjam kepadapihak yang meminjamkan sesuai dengan yang diperjanjikan.⁶⁹ Barang yang dikembalikan sebaiknya masih terjaga dan utuh sesuai denganketika barang itu dipinjam. Pihak peminjam berkewajiban untuk menepati janji yang telah disepakati dan tidak boleh mengingkari janji sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah

⁶⁸<http://www.tintaguru.com/2013/08/pinjam-meminjam.html?m=1> diakses pada hari Rabu, 2 September 2020 pukul 05.29 WIB

⁶⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Lentera Hati, 2002. h. 138.

mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS.An-Nahl :91)⁷⁰

2) Bagi Pemberi Pinjaman

Bagi pemberi pinjaman, hendaknya pinjaman tersebut diberikan atas dasar adanya keinginan untuk tolong menolong. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja." Katakanlah: "Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?"(QS. Al-Baqarah (2): 280)⁷¹

3) Tatakrama Berhutang

Islam juga telah mengatur terkait tentang tatakrama berutang, diantaranya:⁷²

- a) Jika utang piutang dilakukan untuk waktu yang lama hendaknya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan satu orang laki-laki dengan dua orang saksi wanita
- b) Dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak
- c) Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan potongan kepada pihak berutang,

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya "AlAliyy"*...., h. 221.

⁷¹*Ibid.*, h.47.

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 98.

- d) Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar hendaknya disegerakan.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah ulasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang ada kemiripan objek atau permasalahan, yang sangat boleh jadi ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian tersebut dapat berupa laporan penelitian, jurnal, skripsi, tesis atau disertasi.⁷³

1. Penelitian Imel Febriyanti (2017) berjudul *Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong Di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa al-ariyah yang terjadi di desa Labuhan Ratu IX merupakan bentuk pemberian pinjaman yang bukan didasarkan pada adanya keinginan untuk saling tolong menolong, hal ini karena tujuan tengkulak memberikan pinjaman pupuk adalah untuk memudahkan tengkulak dalam mendapatkan barang dagangan tanpa memikirkan apakah pihak petani dirugikan atau tidak dalam praktik tersebut, sehingga hal tersebut kurang sesuai dengan prinsip tauhid, halal dan ibahah sebagaimana tertera dalam Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.⁷⁴
2. Penelitian Mailiah (2017) berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi Pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten*

⁷³Odon1wirawan, tersedia di: <https://brainly.co.id/tugas/270311>, (2 September 2020 Pukul 20:05)

⁷⁴Imel Febriyanti, *Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong Di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2017.

Tanggamus), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis menunjukkan bahwa praktik barang pinjaman yang dijadikan jaminan pada masyarakat Dusun Mincang Sawo dibenarkan menurut syara' karena sudah memenuhi syarat yaitu, menurut Hanafi dan Syafi'i barang pinjaman hanya dapat dijadikan jaminan seiring/ seizin pemilik barang dan termuat dalam KHES pasal 385 ayat 2. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang memang sudah dilakukan sesuai dengan syara' hanya saja dalam pelaksanaan perjanjiannya ada beberapa pihak yang tidak menunaikan kewajibannya, baik terhadap hutangnya maupun barang pinjamannya.⁷⁵

3. Penelitian Sarina (2018) berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadakkong Kabupaten Pinrang, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Dengan hasil penelitian bahwa praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat tersebut termasuk dalam kategori riba karena dalam pembayaran itu ada tambahan yang dilakukan di dalamnya. Sedangkan dalam hukum Islam bahwasannya tambahan yang ada dalam pembayaran apalagi ketika hal tersebut dipersyaratkan maka hal tersebut dilarang dan haram. Dan dalam pelaksanaan praktek pinjam-meminjam yang dilakukan oleh

⁷⁵Mailiah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi Pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

masyarakat tersebut dilakukan dengan beberapa cara yang telah menjadi rutinitas saat ini. Seperti tidak menulis perjanjian pinjam-meminjam karena didasarkan pada kekeluargaan dan kepercayaan.⁷⁶

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tinjauan hukum Islam tentang tuntutan kerusakan barang yang dipinjam tanpa akad di Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung yang berfokus pada pergantian barang baru akibat kerusakan barang yang dipinjam namun tidak disebabkan kesalahan oleh kedua belah pihak melainkan karena arus listrik dan umur objek pinjam-meminjam yang sudah tua.



⁷⁶Sarina, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadakkong Kabupaten Pinrang, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arsip Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- AS, Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAN Raden Intan Lampung, 2014.
- Azam, Muhammad, Aziz, Abdul, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Baidhawi, Ali, Muhammad, *Shahih Bukhori*, Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2004.
- Dawan Syariah Nasional MuI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Elangga, 2014.
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ghazaly, Rahman, Abdul, dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Fajar Interpretama Offest, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Imel Febriyanti: “*Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah*” (Studi Kasus Pada Singkong di Desa labuahan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur Tahun 2017)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015-2019
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Kodir, Abdul, Muhammad, *Hukum dan Peneiti Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mahmudah, Siti, *Historisitas Syariah Kritik Relasi-Kausa Khalil Abdul Karim*, Yogyakarta: LKiS, 2016.

Mailiah: “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang*” (Studi Pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tahun 2017)

Mannan, Abdul, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Margon, S, *Metodelogi Penelitan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Muslich, Wardi, Ahmad, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

Narkubo, Cholid, Achamadi, Abu, *Metodelogi Peneitian*, Jakarta: Bumi Askara, 2012.

Naskah Ilmiah:

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Pabandu, Tika, Muhammad, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Askara, 2006.

Raco, J. R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2016.

Sangadji, Mamang, Eta, Sipiah, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Sarina: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadakkong Kabupaten Pingrang tahun 2018*”

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007

Sugiana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabet, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitan Hukum*, Bandung: Alfa Beta, 2008.

Suharwardi, Lubis, K, dkk, *Hukum Ekonomi Syarah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sumitro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Poitik di Indoesia*, Jawa Timur: Banyumedia Pubhlishing, 2005.

Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Syafe’I, Rachmat, *Fiqih Mamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sumber On-Line

<http://www.tintaguru.com/2013/08/pinjam-meminjam.html?m=1> diakses pada hari Rabu, 2 September 2020 pukul 05.29 WIB

Imel Febriyanti, *Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong Di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2017.

Mailiah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi Pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Odon1wirawan, tersedia di: <https://brainly.co.id/tugas/270311>, (2 September 2020 Pukul 20:05)

Sarina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadakkong Kabupaten Pinrang*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2018.

Wawancara

Diah Iestari (Penghuni Kost), *Wawancara*, Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung, 01 Oktober 2020.

Diah Permata, (Pemilik Kos), *Wawancara*, Di Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung, 26 September 2020.

Edo Fernando (Pemilik Kos), *Wawancara*, Di Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung, 26 September 2020.

Edo Fernando, (Pemilik Kost), *Wawancara*, Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung, 29 September 2020.

Firda (Penghuni Kost), *Wawancara*, Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung, 03 Oktober 2020.

Gova Mela Sari (Penghuni Kost), *Wawancara*, Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung, 01 Oktober 2020.

Mega Puspita (Penghuni Kost), *Wawancara*, Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung, 02 Oktober 2020

Mia Sari (Penghuni Kost), *Wawancara*, Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung, 02 Oktober 2020

Nabila Maharani (Penghuni Kost), *Wawancara*, Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung, 01 Oktober 2020

Nahda Meila (Penghuni Kost), *Wawancara*, Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung, 02 Oktober 2020

Yuliani (Penghuni Kost), *Wawancara*, Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung, 01 Oktober 2020.

